

KONTESTASI DI BALIK DAMAI: KONFLIK ANTAR KELOMPOK EKONOMI DOMINAN DI KAWASAN GOR SATRIA PURWOKERTO

Oleh :

Rivaldo Noval Putra Santosa¹⁾, Agus Adriyanto²⁾

¹Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

¹Email: rivaldonoval@gmail.com

²Email: agus.adriyanto@idu.ac.id

Abstrak

Dinamika yang terjadi di Kawasan GOR Satria Purwokerto menciptakan permasalahan yang begitu kompleks khususnya terkait persaingan antar kelompok ekonomi dominan dan terbatasnya masyarakat lokal dalam mengakses ruang ekonomi publik. Akibat dari dominasi kegiatan perekonomian oleh kelompok ekonomi dominan tersebut malah berimbas pada terpinggirkannya kepentingan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Adapun metodologi pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi literatur. Kemudian, untuk menganalisis persoalan yang ada di dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa teori yakni teori pohon konflik, teori privatisasi ekonomi, teori kontestasi, dan teori negosiasi. Setelah dilakukan analisis, hasil penelitian ini menemukan bahwa dinamika pasang surut antar kelompok dominan ekonomi berangkat dari klaim ruang ekonomi publik, maka timbul gerakan tersendiri melalui jalur non-institusional dalam upaya melindungi kepentingan masing-masing pihak, dan ketika hal tersebut terjadi, maka entitas yang berbeda dari setiap aktor saling berbenturan.

Kata Kunci: kontestasi, konflik, privatisasi ekonomi, perdamaian

1. PENDAHULUAN

Dilihat dari kacamata ekonomi, Banyumas memiliki tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jateng. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PAD Banyumas terus meningkat dari Rp 193.263.340 pada 2018 menjadi Rp 242.106.509 pada 2019 dan Rp 308.349.434 pada 2020. Jumlah ini hanya kalah dari Kota Semarang yang mendapatkan PAD sebesar Rp 522.925.031 pada 2018, naik menjadi Rp 786.563.412 pada 2019 dan Rp 925.919.311 pada 2020 (BPS, 2020). Berangkat dari motif tersebut, Banyumas dapat menjadi sampel dari kota besar di Jateng. Dengan perputaran modal ekonomi yang cukup kuat, fragmentasi oleh kelompok dominan ekonomi menjadi teka-teki yang menarik untuk diteliti. Dalam kajian ilmu sosial dan politik, lazim dalam teori privatisasi bahwa kelompok ekonomi yang kuat menjadi variabel penentu dalam mendorong proses privatisasi tersebut. Dalam konteks Banyumas, khususnya Purwokerto, perkembangan ekonomi secara tidak langsung mendorong mobilisasi orang untuk hilir mudik ke Banyumas. Hal ini dapat berpotensi mendorong munculnya fenomena privatisasi dalam pengelolaan ruang ekonomi publik. Ruang tersebut yang seharusnya menjadi wewenang dari Pemda Kabupaten Banyumas malah bergeser ke arah persaingan oleh berbagai kelompok informal yang mempunyai kepentingan dibaliknya. Fenomena privatisasi ruang ekonomi publik melalui penguasaan yang dilakukan oleh berbagai organisasi informal tersebut akhirnya menyisakan berbagai persoalan diantara mereka. Kelompok-kelompok tersebut saling

bersaing untuk mendapatkan ruang ekonomi publik yang berpotensi menghasilkan modal ekonomi yang menguntungkan. Salah satu riset terdahulu menyebutkan, penguasaan ruang ekonomi publik di kawasan Kabupaten Banyumas di dominasi oleh kelompok informal yang memiliki power lebih besar dibanding negara (Cahyadi, 2019).

Keberadaan kelompok perekonomian di kawasan GOR Satria Purwokerto diperkirakan terbagi atas dua kelompok ekonomi dominan, yaitu kelompok bisnis Tionghoa dan kelompok bisnis Arab. Dengan adanya kelompok ekonomi dominan tersebut satu hal yang pasti yaitu kawasan GOR Satria Purwokerto tidak terpisahkan dari keberadaan para pelaku ekonomi sektor informal dan menunjukkan bahwasanya terdapat suatu kepentingan yang besar. Kepentingan yang dibawa oleh kelompok ekonomi tersebut direalisasikan dalam aktifitas perekonomian berupa perdagangan. Kegiatan tersebut mendominasi setiap sudut celah-celah kosong kawasan GOR Satria Purwokerto.

Dinamika yang terjadi di Kawasan GOR Satria Purwokerto menciptakan permasalahan yang begitu kompleks khususnya terkait persaingan antar kelompok ekonomi dominan dan terbatasnya masyarakat lokal dalam mengakses ruang ekonomi publik. Akibat dari dominasi kegiatan perekonomian oleh kelompok ekonomi dominan tersebut malah berimbas pada terpinggirkannya kepentingan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Seharunya pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat lokal ditengah keadaan bahwasanya kepentingan mereka semakin

terancam oleh keberadaan kelompok ekonomi dominan yang menguasai pasar. Oleh sebab itu, pengawasan dan kontrol pada kawasan GOR Satria Purwokerto semestinya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri agar kepentingan ekonomi masyarakat lokal dapat terlindungi. Namun, kenyataan besar yang tengah terjadi saat ini justru kedua kelompok ekonomi dominan tersebut malah berkutit pada persaingan untuk bagaimana caranya memperluas ruang ekonomi publik mana saja yang akan dicaploknya, tanpa memperdulikan nasib ekonomi masyarakat lokalnya.

Fakta di lapangan turut menunjukkan bahwa lahan-lahan yang menjadi persaingan kelompok ekonomi dominan hanya seputar perebutan lahan parkir, lahan perdagangan makanan, lahan perdagangan pakaian, dan lahan lainnya yang akan digunakan untuk pembangunan ruko. Fenomena yang tengah terjadi menunjukkan bahwa kawasan GOR Satria Purwokerto telah terdominasi dan terprivatisasi oleh kelompok ekonomi dominan. Hingga pada ujungnya permasalahan tersebut telah menjelma menjadi arena kontestasi antar kelompok kepentingan ekonomi/pasar serta melahirkan *conflict of interest* yang ditandai dengan adanya persaingan antar kelompok ekonomi dominan yang berpotensi mereduksi kepentingan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

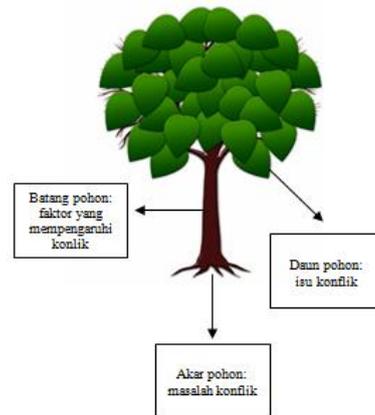
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian termasuk dalam penelitian eksploratif yaitu dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang awalnya peneliti hanya memahami permasalahan yang ada secara umum, baru kemudian peneliti melakukan penelitian. Penelitian eksploratif memiliki masalah yang belum pernah dijejaki, dan berusaha menemukan atau mengungkap permasalahan yang sedang dibutuhkan atau akan diteliti tersebut (Bungin, 2011). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka/literatur yaitu peneliti menelaah secara tekun akan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik

Untuk mengetahui dinamika konflik dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan pohon konflik sebagai instrumen analisis konflik. Dalam instrumen pohon konflik ini terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan yaitu (a) akar pohon yang merepresentasikan akar konflik, (b) batang konflik yang merepresentasikan faktor dinamis yang dapat

mempengaruhi isu konflik, (c) daun pohon yang merepresentasikan isu atau topik konflik. Berikut ini penjelasannya terkait kasus konflik ini:



Keterangan:

- Akar Pohon = Akar Penyebab Konflik. Setidaknya terdapat dua akar masalah di dalam konflik ini yaitu: ambisi dari masing-masing kelompok ekonomi dominan untuk tetap mengedepankan eksistensi ekonominya dan adanya upaya privatisasi ruang ekonomi publik oleh kelompok ekonomi dominan sehingga mengesampingkan kepentingan ekonomi masyarakat lokal.
- Batang Pohon = Faktor yang Dapat Mempengaruhi Dinamika Konflik. Seolah-olah Pemda Kab. Banyumas merestui upaya dominasi ruang ekonomi publik oleh kelompok ekonomi dominan. Hal ini ditunjukkan ketika Pemda Kab. Banyumas tidak menggunakan otoritasnya dalam mengelola ruang ekonomi publik di sekitar GOR Purwokerto.
- Daun Pohon = Isu Konflik. Perebutan sumber-sumber ekonomi oleh kelompok ekonomi dominan. Hal ini dilakukan dengan menguasai tempat-tempat ekonomi strategis di sekitar GOR Purwokerto

Intervensi Ruang Ekonomi Publik di Kawasan GOR Satria Purwokerto oleh Kelompok Ekonomi Dominan

Aktor penguasa ruang ekonomi publik kawasan GOR Satria Purwokerto bukan hanya pemerintah, namun juga kelompok perekonomian informal. Wilayah cakupan yang dikelola oleh kelompok tersebut terbagi dalam tiga wilayah, yaitu lahan parkir, lahan perdagangan makanan/minuman, dan lahan ruko. Intervensi kelompok-kelompok ekonomi tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa adanya arahan ataupun pengalihan dari pemerintah. Alasan yang mendasari terjunnya kelompok ekonomi tersebut dikarenakan kepentingan yang berbeda dengan pemerintah. Dalam perspektif privatness, intervensi kelompok perekonomian merupakan bentuk upaya penjejakan pribadi (Margono, 2004). Hal tersebut wajar saja terjadi, karena tindakan kelompok ekonomi tersebut

didasarkan atas kepentingan sepihak (pribadi) dan pastinya berkaitan dengan tujuan perekonomian untuk mendapatkan keuntungan dan mensejahterakan kehidupan kelompoknya. Kuasa yang seharusnya berada di tangan pemerintah telah direbut oleh kelompok ekonomi dominan. Dalam konteks ekonomi politik, pemerintah perlu mengontrol public interest dan mengontrol pasar dibalik kenyataan adanya sistem dominasi oleh pasar dalam hal ini kelompok ekonomi. Namun kepentingan publik gagal terkelola dengan baik ketika kelompok ekonomi yang terlembaga secara legal formal berhasil mengambil alih pengelolaan dari pemerintah.

Dinamika Persaingan Kelompok Bisnis Tionghoa dan Kelompok Bisnis Arab di Kawasan GOR Satria Purwokerto

Di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Purwokerto, terdapat dua kelompok ekonomi dominan dalam diri kelompok bisnis Tionghoa dan kelompok bisnis Arab. Kedua kelompok ini mulai bersaing ketat dalam mendapatkan eksistensi bisnisnya di kawasan GOR Satria Purwokerto. Sebagaimana kita ketahui bersama, kawasan tersebut merupakan arena kontestasi bagi siapapun yang ingin memulai bisnis pribadinya. Aktifitas perekonomian kelompok dominan ekonomi tersebut berada pada titik lokasi dimana semua kepentingan setiap stakeholder melebur jadi satu. Lahan di kawasan GOR Satria Purwokerto merupakan bentuk sumber daya untuk mendistribusikan kepentingan setiap aktor, baik kelompok ekonomi, masyarakat setempat, wisatawan, dan aktor lainnya. Kedua kelompok ekonomi menghendaki adanya lahan yang dapat menampung aktifitas mereka. Lahan yang diinginkan tersebut haruslah strategis agar kepentingannya dapat terpenuhi. Sedangkan situasi di lapangan sendiri, kondisi lahan tersebut sangatlah terbatas untuk mewadahi berbagai macam kepentingan yang ada. Wajar saja bilateral jadi perebutan lahan antar kedua kelompok tersebut yang berujung pada perselisihan. Pada kondisi yang seperti itu kontestasi tak terelakkan, ketika kelompok-kelompok ekonomi dominan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan bersama, maka akibatnya kelompok ekonomi dominan tersebut berupaya dengan caranya sendiri untuk merealisasikan kepentingannya baik itu dengan turun ke jalan maupun menghimpun kekuatan melalui pondasi relasi politik.

Membangun Kesepakatan Antar Kelompok Ekonomi Dominan

Konflik horizontal antara kelompok bisnis Tionghoa dan Arab tidak mudah untuk diatasi. Keterlibatan berbagai aktor informal dalam peta konflik di kawasan GOR Satria Purwokerto semakin memanas, khususnya hubungan antar kedua kelompok ekonomi tersebut. Konflik yang tercipta pada akhirnya juga akan berimbas pada kepentingan masyarakat lokal. Untuk melindungi kepentingan publik dan meredakan tensi konflik yang tengah berlangsung, perlu adanya langkah persuasif guna

membangun kesepakatan-kesepakatan dengan cara pendekatan berupa pertemuan untuk melakukan diskusi yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk negosiasi atau perundingan dikedua belah pihak dalam rangka mengakomodasikan masing-masing kepentingan. Bekerja sama menjadi jalan terbaik untuk saat ini dan kedepannya dalam meredakan konflik. Keputusan bersama diciptakan atas dasar prinsip *win-win solution* yaitu pembagian distribusi kepentingan diwilayah-wilayah tertentu telah disepakati. Membangun kesepakatan melalui negosiasi menjadi satu-satunya cara yang paling efektif pada tataran konflik seperti ini. Intensitas konflik dapat diredam, bukan berarti hilang sepenuhnya. Inilah fungsi negosiasi sesungguhnya, menciptakan ruang komunikasi dan membangun kesepakatan secara bersama-sama pada aktor yang saling berlawanan agar tercipta rasa saling percaya sehingga solusi “damai” bisa dicapai.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Secara umum hasil penelitian ini menemukan bahwa dinamika pasang surut antar kelompok dominan ekonomi berangkat dari klaim ruang ekonomi publik, maka timbul gerakan tersendiri melalui jalur non-institusional dalam upaya melindungi kepentingan masing-masing pihak, dan ketika hal tersebut terjadi, maka entitas yang berbeda dari setiap aktor saling berbenturan.

Rekomendasi

Secara spesifik, berikut beberapa rekomendasi yang ditawarkan, yaitu:

1. Perlu diadakan sosialisasi yang lebih intens mengenai batasan-batasan dalam mengambil alih ruang ekonomi publik. Sehingga setiap kepentingan kelompok dapat terakomodir semua.
2. Kelompok ekonomi perlu mengelola dan menguatkan trust yang sudah terjalin pada tataran kebersamaan dalam menjaga kelestarian kawasan GOR Satria Purwokerto bersama-sama melalui program kepariwisataan tanpa melepaskan orientasi publik.
3. Kedua belah pihak bisa membuat suatu organisasi/paguyuban yang berisi orang-orang kelompok bisnis Tionghoa dan Arab. Sehingga berbagai kepentingan dapat ditampung dalam satu wadah dan bisa menghasilkan keuntungan bersama.
4. Perlu adanya campur tangan Pemda Kabupaten Banyumas dalam memprediksi perkembangan kelompok ekonomi dominan tersebut agar kontrol terhadap perilaku dan tindakan mereka dapat diantisipasi dikemudian hari.
5. Pemda Kabupaten Banyumas juga harus memberikan akses/kesempatan/ruang yang terbuka kepada masyarakat lokal agar mereka bisa membuka bisnisnya di GOR Satria Purwokerto tanpa ketakutan akan tekanan dari kelompok ekonomi dominan.

5. REFERENSI

- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta
- Berlin, Jonathan W. 2008. *The Fundamental of Negotiation*. Vol. 58, No. 1, p13-15.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- BPS Kab. Banyumas. *Akumulasi PAD Kab. Banyumas dari Tahun 2018 s.d 2020*. Purwokerto: Sekertaris BPS Banyumas.
- Cahyadi, Adlan. 2011. *Politik Perparkiran di Purwokerto: Dominasi Aktor Informal dalam Pengelolaan Parkir*. Research Centre for Politics and Government (PolGov). Purwokerto: Unsoed.
- Fazzi dan Cindi. 2003. *Book Review: Negotiation Theory and Application: The Next Generation*. Vol. 58, No. 3.
- Garfinkel, Stacy W. 1998. *Painting and the Language of the Private in Early Nineteent-Century France*. Disertasi: University of California, Barkeley.
- Lang, Jon. 1987. *Creating Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in Environmental Design*. Van Nostramd Reinhold Company: New York.
- Ma, Zhenzhing. 2008. *Personality and Negotiaion Revisited: Toward a Cognitive Model of Dyadic Negotiation*. Vol. 31, No. 10.
- Margono. 2014. *Fenomena Pengelolaan Privatness Melalui Organisasi Non-Publik*. GAVA MEDIA: Yogyakarta.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.